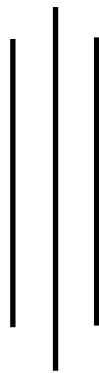




**RANCANGAN AKHIR RENJA  
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat Nya kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun mengacu kepada Renstra Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kondisi tahun ini dan tahun yang akan datang masih diyakini dapat dilaksanakan dengan dukungan maksimal dari Instansi terkait dan Mitra Kerja lainnya.

Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat di pertanggung jawabkan karena semua Kebijakan, Program, Sasaran, dan Kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik, menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang bermakna dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar pada tahun 2024, kami sampaikan terima kasih.



DAFTAR ISI

Hal	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penulis.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan RK.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiataN Masyarakat.....	10
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	11
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	13
3.3 Program dan Kegiatan .....	14
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB V : PENUTUP</b>	

DAFTAR TABEL

<b>TABEL TC. 29.....</b>	<b>6</b>
<b>TABEL TC. 30.....</b>	<b>7</b>
<b>TABEL TC. 31.....</b>	<b>9</b>
<b>TABEL TC. 33.....</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan penyusunannya berpedoman pada RKPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh organisasi Perangkat Daerah (ODP) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menetapkan rencana Pembangunan jangka Menengah yang mengacu kepada mekanisme perencanaan nasional. Rencana kerja ini merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dan rencana strategis yang sifatnya lebih detail dalam rangka menghasilkan perencanaan yang sistematis dan konsisten, menyusun dan merumuskan strategi yang mengarah pada pencapaian program jangka panjang, jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rencana yang lebih terukur dengan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan, mengukur secara rinci kinerja dan umpan balik yang dihasilkan dengan logis, terorganisasi dan sistematis.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pagu anggaran. Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat terarah dan berhasil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar , evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra, selanjutnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Mempedomani sebagaimana penjelasan di atas, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Pematangsiantar dan akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dianggarkan pada RAPBD Kota Pematangsiantar untuk setiap tahunnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022
14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar

### **1. 3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen yang disusun ini sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar tahun 2025 dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara bidang serta efisien alokasi berbagai sumber daya yang ada, sehingga dokumen bagi pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan pencapaian kinerja.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mempermudah pelaksanaan kegiatan selama 1 ( satu ) tahun ke depan. Secara sistematis dapat digambarkan tentang tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2025;
3. Optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis perangkat daerah
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra serta faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penting untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah dengan rata – rata sebesar 97,91 %;
2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dengan rata - rata sebesar 100 %;
3. Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dengan rata - rata capaian sebesar 92,95 %
4. Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebesar 93,18 % .

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, dapat dianalisa bahwa sebahagian besar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan dengan predikat Tinggi.

Perkiraan capaian kinerja Tahun 2024 diprediksi lebih rendah dari tahun 2023, dimana pada pelaksanaan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terdapat ketidak sesuaian dengan Jadwal yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, hal ini diakibatkan bertambahnya kriteria/persyaratan pada pelaksanaan kegiatan dan lambatnya proses pengadaan barang/ jasa sehingga mengakibatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

KOTA PEMATANG SIANTAR

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022-2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	70 %	0	55 %	0	0	50%	0	0
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33 orang	0	33 orang	0	0	33 orang	0	0
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	239 orang	0	239 orang	0	0	239 orang	0	0
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0

1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	610 orang	0	610 orang	0	0	610 Orang	0	0
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	610 orang	0	610 orang	0	0	610 Orang	0	0
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	0	40 orang	0	0	40 Orang	0	0
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0	10 orang	0	0	10 Orang	0	0
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental,spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	610 orang	0	610 orang	0	0	610 Orang	0	0
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	610 orang	0	610 orang	0	0	610 Orang	0	0
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	0	5 orang	0	0	5 Orang	0	0
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	0	25 orang	0	0	25 Orang	0	0
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	0	50 orang	0	0	50 Orang	0	0

1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	0	50 orang	0	0	50 Orang	0	0
1	06	04	2.01	11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	0	50 orang	0	0	50 Orang	0	0
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	0	4 orang	0	0	4 Orang	0	0
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06	05	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	100 %	0	100 %	0	0	100	0	0
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	19,178 Orang	0	94,987 Orang	0	0	94.987 Orang	0	0
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	0	150 Keluarga	0	0	150 Keluarga	0	0
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Keluarga	0	63 Keluarga	0	0	63 Keluarga	0	0
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	0	120 Orang	0	0	5 Orang	0	0
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0	30 Orang	0	0	10 Orang	0	0

1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tenmpat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	0	0
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0	5 Orang	0	0	5 Orang	0	0
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	10 Orang	0	0	10 Orang	0	0
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	0	24 Orang	0	0	24 Orang	0	0
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	07	2.01		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokum en	0	1	0	0	1 Dokumen	0	0
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	888 Makam	0	855 Makam	0	0	855 Makam	0	0
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>37.50 %</b>	<b>0</b>	<b>35.85 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,85 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 OPD	0	33 OPD	0	0	33 OPD	0	0
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 OPD	0	33 OPD	0	0	33 OPD	0	0
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	0	20 Lembaga	0	0	20 Lembaga	0	0

2	08	02	2.03	06	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	12	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0	12	Dokumen	0	0
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	0	0
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Konseling Keluarga	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42	Laporan	0	42	Laporan	0	0	42	Laporan	0	0
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kelurahan Ramah Anak	80	%	0	70	%	0	0	70%	0	0	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	0	0

2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47	orang	0	47	orang	0	0	47 Orang	0	0
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Dokum en	0	12	Dokum en	0	0	12 Dokumen	0	0
2	08	06	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokum en	0	1	Dokum en	0	0	1 Dokumen	0	0
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani</b>	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0
2	08	07	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kab/kota	6	Dokum en	0	6	Dokum en	0	0	6 Dokumen	0	0
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	100	%	0	100	%	0	0	100%	0	0
2	08	07	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokum en	0	1	Dokum en	0	0	1 Dokumen	0	0

2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	100	100	0	0	100%	0	0
2	08	07	2.03	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenKoordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	3 Dokum en	0	1 Dokum en	0	0	0	1 Dokumen	0	0
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>B B</b>	-	<b>CC B</b>	-	-	-	<b>CC</b>	-	-
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0	100 %	0	0	0	100 %	0	0
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	0	3 Dokum en	0	0	0	3 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	0	0	1 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapora n	0	3 Dokum en	0	0	0	3 Dokumen	0	0
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	0	100 %	0	0	0	100%	0	0
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	0	40 orang	0	0	0	40 Orang	0	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	0	100 %	0	0	0	100%	0	0
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	12 Paket	0	0
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	0	0	12 Paket	0	0

1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	0	12 Paket	0	0
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	0	12 Paket	0	0
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 12	0	12 12	0	0	12 Paket	0	0
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	0	90 Laporan	0	0	90 Laporan	0	0
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	0	12 Dokumen	0	0
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	0	5 Unit	0	0	5 Unit	0	0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0	12 Laporan	0	0
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0	12 Laporan	0	0
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0	100 %	0	0	100%	0	0
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	0	4 Unit	0	0	4 Unit	0	0
1	06	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit	0	13 Unit	0	0	13 Unit	0	0

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 berdampak langsung kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan permakanaan bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- b. Pemberian bantuan berupa bahan pangan bagi korban bencana alam maupun sosial;
- c. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak inflasi;
- d. Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan sosial;
- e. Pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEMATANG SIANTAR**

[illegible]

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan dimasa mendatang.

Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu layanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial pada Permendagri No.59 Tahun 2021 yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
  - a. Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan
5. pengemis di luar panti;
6. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska
7. bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu penting pada urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pematangsiantar;
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Pada dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2025, data yang digunakan adalah data perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2027. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2024 pada dokumen

tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada Tabel T-C.31 pada halaman berikut :

TABEL T-C. 31											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025											
KOTA PEMATANGSIANTAR											
NAMA OPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif</b>	<b>55%</b>	<b>383,213,407</b>	1. <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif</b>	<b>55%</b>	<b>135,000,000</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota</b>	Dinsos P3A	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100 %	383,213,407	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota</b>	Dinsos P3A	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100 %	135,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Dinsos P3A	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	103,280,754		Dinsos P3A	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	55,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P4A	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	239 Orang	279,932,653		Dinsos P4A	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	239 Orang	80,000,000	
2.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Capaian SPM Bidang Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>698,706,069</b>	2. <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Capaian SPM Bidang Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>306,305,000</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial</b>	Dinsos P3A	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	100 %	698,706,069	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial</b>	Dinsos P3A	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	100 %	306,305,000	
	Penyediaan Permakanan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	361,176,606		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	125,000,000	
	Penyediaan Sandang	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang menerima Pakai dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	186,678,300		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang menerima Pakai dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	60,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	96,275,813		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4,590,450		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	1,800,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dinsos P3A	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	12,241,200		Dinsos P3A	fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	41,000,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Dinsos P3A	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	4,590,450		Dinsos P3A	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	610 Orang	8,800,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1,530,150		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1,125,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	8,160,800		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	9,000,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	13,261,300		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6,000,000	
	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5,100,500		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	1,200,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5,100,500		Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2,380,000	
3.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>159,211,536</b>	3. <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>995,406,830</b>	
	<b>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota</b>		Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	100%	159,211,536	<b>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota</b>		Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	100%	995,406,830	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Dinsos P3A	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	90.238 orang	78,419,616		Dinsos P3A	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	84.824 Orang	100,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos P3A	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	66 KPM	80,791,920		Dinsos P3A	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	700 Keluarga	895,406,830	
4.	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>99,969,800</b>	4. <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>101,000,000</b>	

	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Dinsos P3A	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	99,969,800		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Dinsos P3A	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	101,000,000	
	Penyediaan Makanan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	64,266,300		Penyediaan Makanan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	70,000,000	
	Penyediaan Sandang	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12,241,200		Penyediaan Sandang	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15,000,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos P3A	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	15,301,500		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos P3A	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	10,000,000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3,060,300		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinsos P3A	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3,000,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,100,500		Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,000,000	
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>18,810,134</b>	5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>32,726,250</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	18,810,134		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	32,726,250	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	876 Makam	18,810,134		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	876 Makam	32,726,250	
6.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>36 indeks</b>	<b>145,379,771</b>	6.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>36 indeks</b>	<b>178,009,730</b>	
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota</b>		Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	100%	53,570,771		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota</b>		Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	100%	64,495,805	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	35 Perangkat Daerah	20,402,000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dinsos P3A	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan	35 Perangkat Daerah	63,406,625	
	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	53,570,771		Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	64,495,805	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>35,703,500</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>68,535,529</b>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,703,500		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68,535,529	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		<b>56,105,500</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Dinsos P3A	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		<b>44,978,396</b>	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya lembaga pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	20 Lembaga	56,105,500		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	20 Lembaga	44,978,396	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan</b>	<b>100%</b>	<b>61,206,000</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan</b>	<b>100%</b>	<b>95,323,638</b>	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	30,603,000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	47,500,696	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,603,000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	47,500,696	

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	30,603,000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	47,822,942	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	40 Orang	30,603,000		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	40 Orang	47,822,942	
7.	<b>PROGRAM Peningkatan KUALITAS KELUARGA</b>	Dinsos P3A	<b>Cakupan Layanan Konseling Keluarga</b>	100 %	663,065,000	7.	<b>PROGRAM Peningkatan KUALITAS KELUARGA</b>	Dinsos P3A	<b>Cakupan Layanan Konseling Keluarga</b>	100 %	400,000,000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Dinsos P3A	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	100 %	663,065,000		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Dinsos P3A	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	100 %	400,000,000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	663,065,000		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	42 Dokumen	400,000,000	
8.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>		<b>Persentase Keluruhan Ramah Anak</b>	80 %	103,171,798	8.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>		<b>Persentase Keluruhan Ramah Anak</b>	80 %	82,532,892	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Dinsos P3A	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	100 %	67,468,298		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Dinsos P3A	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	100 %	44,865,296	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67,468,298		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	44,865,296	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	100%	35,703,500		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	100%	37,667,596	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	35,703,500		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	37,667,596	
9.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani</b>	100%	51,005,000	9.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani</b>	100%	150,406,429	
	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Dinsos P3A	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	100%	30,603,000		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Dinsos P3A	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	100%	43,035,596	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan anak, dan DRPPA		Jumlah Kegiatan pencegahan KIA terpadu	6 Kegiatan	30,603,000		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan anak, dan DRPPA		Jumlah Kegiatan pencegahan KIA terpadu	6 kegiatan	43,035,596	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Dinsos P3A	Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	15,301,500		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Dinsos P3A	Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	52,368,896	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinsos P3A	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Orang	15,301,500		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Dinsos P3A	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Orang	52,368,896	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota		Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	5,100,500		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota		Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	55,001,937	
	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi ) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	1 Dokumen	5,100,500		Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi ) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	1 Dokumen	55,001,937	
10.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	B	4,936,549,650	10.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	B	5,375,461,339	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	4,335,425,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	3,660,960,753	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos P3A	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	40 Orang/ 14 Bulan	4,335,425,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos P3A	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	40 Orang/ 14 Bulan	3,660,960,753	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		179,751,280		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi		674,500,586	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	4,610,816		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	5,921,514	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	39,772,259		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	91,345,485	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos P3A	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	6,120,600		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos P3A	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	17,073,180	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	7,548,740		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	215,752,040	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos P3A	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	20,402,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos P3A	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	43,615,367	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	101,296,865		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	300,793,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	36,723,600		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	290,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	36,723,600		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3A	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 Unit	290,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	349,399,960		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	575,000,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	17,173,792		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	25,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	332,226,168		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos P3A	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	550,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100%</b>	<b>35,249,811</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100%</b>	<b>175,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos P3A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	30,149,311		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos P3A	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	140,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit	5,100,500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	20,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	-		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	15,000,000	
	<b>Jumlah .....</b>				<b>7,259,082,165</b>		<b>Jumlah.....</b>				<b>7,756,848,470</b>	

## **2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sesuai dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Adapun Program Nasional pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dasar dalam penyusunan Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

##### **A. Urusan Sosial dengan program sebagai berikut :**

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

##### **B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program sebagai berikut :**

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan kualitas keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta

meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.

- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas. Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar. Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional.
3. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

**3. 2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Pematangsiantar sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Dan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka disusunlah beberapa sasaran.

Tujuan sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu kebutuhan dasarnya	1.1 Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1.2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana
			1.2.Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta peran perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan Gender	2.Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD

			3. Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan
			1. Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
			3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

### 3. 3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpalan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dengan program yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai sasran dan tujuan tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan instansi pula diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah menyusun pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melakukan tugas yang dimaksud maka penting kiranya menetapkan rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2025 serta perkiraan maju tahun anggaran 2026 yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C.33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KOTA PEMATANGSIANTAR  
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE					URUSAN/BIDANG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9,457,043,893				9,457,043,893
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,816,306,638				8,816,306,638
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah			6,119,500,924				6,119,500,924
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan			3,800,075,475				3,800,075,475
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Dinsos P3A	40 Orang/ 14 Bulan	3,800,075,475	DAU		40 Orang/ 14 Bulan	3,800,075,475
1	06	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum			755,861,054				755,861,054
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinsos P3A	12 Paket	5,921,514	DAU		12 Paket	5,921,514
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos P3A	12 Paket	81,934,366	DAU		12 Paket	81,934,366
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos P3A	12 Paket	86,819,117	DAU		12 Paket	86,819,117
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinsos P3A	12 Paket	189,765,640	DAU		12 Paket	189,765,640

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinsos P3A	12 Paket	34,631,417	DAU		12 Paket	34,631,417
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos P3A	120 Laporan	356,789,000	DAU		120 Laporan	356,789,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			728,128,085				728,128,085
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinsos P3A	50 Unit	728,128,085	DAU		50 Unit	728,128,085
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600,310,500				600,310,500
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinsos P3A	12 Laporan	51,695,500	DAU		12 Laporan	51,695,500
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos P3A	12 Laporan	548,615,000	DAU		12 Laporan	548,615,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235,125,810				235,125,810
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinsos P3A	8 Unit	177,805,810	DAU		8 Unit	177,805,810

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumbe r Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinsos P3A	20 Unit	26,840,000	DAU		20 Unit	26,840,000
1	06	01	2.10	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos P3A	12 Unit	30,480,000	DAU		12 Unit	30,480,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif			198,605,671				198,605,671
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota			198,605,671				198,605,671
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	36 Orang	80,971,000	DAU		36 Orang	80,971,000
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	239 Orang	117,634,671	DAU		239 Orang	117,634,671
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial			531,636,361				531,636,361
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial			531,636,361				531,636,361

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	610 Orang	279,602,590	DAU		610 Orang	279,602,590
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	610 Orang	96,342,480	DAU		610 Orang	96,342,480
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	50 Orang	66,650,359	DAU		50 Orang	66,650,359
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	15 Orang	1,800,000	DAU		15 Orang	1,800,000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental,spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	610 Orang	50,632,045	DAU		610 Orang	50,632,045
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	610 Orang	13,200,000	DAU		610 Orang	13,200,000

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	10 Orang	1,125,000	DAU		10 Orang	1,125,000
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	25 Orang	7,875,000	DAU		25 Orang	7,875,000
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	50 Orang	6,068,887	DAU		50 Orang	6,068,887
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	50 Orang	1,200,000	DAU		50 Orang	1,200,000
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	15 Orang	7,140,000	DAU		15 Orang	7,140,000
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial</b>			<b>1,792,337,051</b>				<b>1,792,337,051</b>
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota</b>			<b>1,792,337,051</b>				<b>1,792,337,051</b>

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumbe r Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Dinsos P3A	84.824 Orang	113,672,938	DAU		84.824 Orang	113,672,938
2	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	700 Keluarga	1,678,664,113	DAU		700 Keluarga	1,678,664,113
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat			140,736,631				140,736,631
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			140,736,631				140,736,631
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	120 Orang	79,273,890	DAU		120 Orang	79,273,890
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	30 Orang	26,092,755	DAU		30 Orang	26,092,755

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tenmpat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	1 Unit	26,850,506	DAU		1 Unit	26,850,506
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	10 Orang	2,269,480	DAU		10 Orang	2,269,480
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	20 Orang	6,250,000	DAU		20 Orang	6,250,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	148,352,941			100%	148,352,941
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	27 orang	148,352,941			27 orang	148,352,941
2	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional			33,490,000				33,490,000
2	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			33,490,000				33,490,000
2	06		2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	876 Makam	33,490,000	DAU		876 Makam	33,490,000

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumbe r Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				640,737,255				640,737,255
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				640,737,255				640,737,255
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender			137,268,782				137,268,782
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota			47,706,669				47,706,669
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	Dinsos P3A	35 OPD	45,155,565			35 OPD	45,155,565
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	33 Perangkat Daerah	47,706,669	DAU		33 Perangkat Daerah	47,706,669

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			50,934,369				50,934,369
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	1 Dokumen	50,934,369	DAU		1 Dokumen	50,934,369
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota			38,627,744				38,627,744
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Dinsos P3A	20 Orang	38,627,744	DAU		20 Orang	38,627,744
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Konseling Keluarga			200,000,000				200,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
2	08	04	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota			200,000,000				200,000,000
2	08	04	02.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	42 Dokumen	200,000,000	DAU		42 Dokumen	200,000,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kelurahan Ramah Anak			199,151,769				199,151,769
2	08	06	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota			72,323,263				72,323,263
2	08	06	02.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	1 Dokumen	72,323,263	DAU		1 Dokumen	72,323,263
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota			126,828,506				126,828,506

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
2	08	06	02.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	50 Orang	56,350,424	DAU		50 Orang	56,350,424
2	08	06	02.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	12 Dokumen	70,478,082	DAU		12 Dokumen	70,478,082
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani</b>			<b>104,316,704</b>				<b>104,316,704</b>
2	08	07	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota</b>			<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan pencegahan KtA terpadu	Dinsos P3A	6 kegiatan	50,000,000	DAU		6 kegiatan	50,000,000
2	08	07	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinsos P3A</b>	<b>100%</b>	<b>24,316,704</b>			<b>100%</b>	<b>24,316,704</b>

KODE					URUSAN/BIDANG  Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp )
1					2	3	4	5	6			9	10
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Dinsos P3A	200 layanan	24,316,704	DAU		200 layanan	24,316,704
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dinsos P3A	100%	30,000,000			100%	30,000,000
2	08	07	2.01	0007	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi ) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	Dinsos P3A	1 Dokumen	30,000,000	DAU		1 Dokumen	30,000,000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menetapkan rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikator berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>220.000.000</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>220.000.000</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000
<b>2.</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.184.020.496</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta Gelandangan pengemis di luar panti sosial di luar panti</b>	<b>1.184.020.496</b>
	Penyediaan pemakaman	702.715.496
	Penyediaan Sandang	250.000.000,
	Penyediaan Alat Bantu	100.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	101.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	8.800.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	1.125.000
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	9.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.200.000
	Pemberian Layanan Rujukan	2.380.000
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.045.406.830</b>
	<b>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota</b>	<b>1.045.406.830</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	150.000.000

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	895.406.830
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>240.000.000</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>190.000.000</b>
	Penyediaan Makanan	110.000.000
	Penyediaan Sandang	50.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	7.000.000
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>32.726.250</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>32.726.250</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.726.250
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>235.441.515</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>140.000.000</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	70.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>45.307.773</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan EkonomiSosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	45.307.773
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>50.133.742</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.133.742
<b>7.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>105.000.000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot</b>	<b>70.000.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</b>	<b>35.000.000</b>

	<b>Kabupaten/Kota</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000
<b>8.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>350.000.000</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota</b>	<b>350.000.000</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	350.000.000
<b>9.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>183.151.769</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>56.323.263</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	56.323.263
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota</b>	<b>126.828.506</b>
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	56.350.424
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	70.478.082
<b>10.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>165.000.000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota</b>	<b>50.000.000</b>
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan anak, dan DRPPA	50.000.000
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>55.000.000</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	55.000.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>
	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi ) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
	<b>Jumlah .....</b>	<b>9.580.793.668</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta Renstra.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun pada Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini sudah mempertimbangkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022 – 2027 serta isu – isu strategis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Tahun 2025, diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 lebih terarah, karena sudah disusun arah yang menjadi acuan, dengan demikian diharapkan lebih tepat guna dan tepat sasaran baik dalam hal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dalam hal pembiayaan maupun pencapaian target kinerja serta serapan anggaran.

